

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD)
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024

A. Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Capaian kinerja makro yang diperoleh oleh Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Capaian Indikator Kinerja Makro

NO	Indikator Kinerja Marko	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024	Perubahan %
1	Indeks Pembangunan Manusia	73,87	74,82	1,29
2	Angka Kemiskinan	5,56	5,32	-4.317
3	Angka Pengangguran	6,22	6,02	-3.215
4	Pertumbuhan Ekonomi	4,35	3,86	-11.26
5	Pendapatan Per-Kapita	55,63	58,71	5,54
6	Ketimpangan Pendapatan	0,291	0,233	-19,931

Sumber data: Dharmasraya Dalam Angka Tahun 2025

B. Ringkasan Capaian Kinerja Urusan Pelayanan Dasar

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Urusan Pelayanan Dasar

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	
					Capaian (%)	Keterangan
1.a.1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD = 8.647 Jumlah anak usia 5-6 tahun di Kabupaten =8.647	100	Dinas Pendidikan Disdukcapil
1.a.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar = 26.933 Jumlah anak usia 7-12 tahun di Kabupaten = 26.933	100	Dinas Pendidikan Disdukcapil
1.a.3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama = 13.690 Jumlah anak usia 13-15 tahun di Kabupaten = 13.690	100	Dinas Pendidikan Disdukcapil
1.a.4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat dan sedang belajar di pendidikan kesetaraan = 927 Jumlah anak usia 7-18 tahun yang Belum menyelesaikan pendidikan dasar dan Menengah (yang tidak sekolah/putus	100	Dinas Pendidikan

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	
					Capaian (%)	Keterangan
				sekolah) di Kabupaten = 927		
1.b.1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Rasio daya tampung RS Rujukan	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan = 242.192 Jumlah Penduduk di Kabupaten = 242.192	100	Dinas Kesehatan Disdukcapil
1.b.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten yang terakreditasi	Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi = 2 Jumlah RS di Kabupaten = 2	100	Dinas Kesehatan
1.b.3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan = 3.186 Jumlah ibu hamil di Kabupaten = 3.619	88,04	Dinas Kesehatan
1.b.4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan = 3.206 Jumlah ibu bersalin di Kabupaten = 3.508	91,39	Dinas Kesehatan
1.b.5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = 3.207 Jumlah bayi baru lahir di Kabupaten = 3.487	91,97	Dinas Kesehatan
1.b.6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = 17.862 Jumlah balita di Kabupaten = 18.542	96,33	Dinas Kesehatan
1.b.7	Urusan Pemerintahan	Kesehatan	Persentase anak usia	Jumlah anak usia pendidikan	91,79	Dinas Kesehatan

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	
					Capaian (%)	Keterangan
	Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar		pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = 37.288 Jumlah anak usia pendidikan dasar di Kabupaten = 40.623%		Disdukcapi
1.b.8	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar = 137.838 Jumlah orang usia 15-59 tahun di Kabupaten = 158.025	87,23	Dinas Kesehatan Disdukcapi
1.b.9	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar = 17.056 Jumlah orang warga negara usia 60 tahun di Kabupaten = 22.459	75,94	Dinas Kesehatan Disdukcapi
1.b.10	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 22.039 Jumlah penderita hipertensi di Kabupaten = 22.190	99,32	Dinas Kesehatan
1.b.11	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 2.419 Jumlah penderita DM di Kabupaten = 2.442	99,06	Dinas Kesehatan
1.b.12	Urusan Pemerintahan Wajib	Kesehatan	Persentase ODGJ berat yang	Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan	100	Dinas Kesehatan

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	
					Capaian (%)	Keterangan
	Berkaitan Pelayanan Dasar		mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	pelayanan kesehatan sesuai standar = 447 Jumlah penderita ODGJ di Kabupaten = 447		
1.b.13	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 3.686 Jumlah penderita TBC di Kabupaten = 3.686	100	Dinas Kesehatan
1.b.14	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar = 4.155 Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di Kabupaten = 4.155	100	Dinas Kesehatan
1.c.1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab. Dharmasraya (ha) = 0 Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kabupaten (ha) = 1	0 (TDI)	Dinas PUPR
1.c.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang Terlindungi oleh infrastruktur	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten (m) = 0	0 (TDI)	Dinas PUPR

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	
					Capaian (%)	Keterangan
			pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten.	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan Kabupaten (m) = 1		
1.c.3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas irigasi kewenangan Kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasi dan pelihara (ha) di tahun eksisting = 1.612 luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten = 2.225	72,45	Dinas PUPR
1.c.4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten. = 52.465 Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut. = 58.526	89,64	Dinas PUPR
1.c.5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan	92,5	Dinas PUPR

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	
					Capaian (%)	Keterangan
				rumah dan air limbahnya diolah di IPALD = 54.110 Jumlah rumah di Kabupaten = 58.526		
1.c.6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio kepatuhan IMB Kabupaten	Jumlah pemanfaatan Persetujuan Bangunan Gedung yang sesuai peruntukannya = 49 Jumlah Persetujuan Bangunan Gedung yang berlaku = 49	100	Dinas PUPR
1.c.7	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten	Panjang jalan kewenangan Kabupaten yang mantap (baik dan sedang) = 574,80 Panjang jalan keseluruhan diwilayah kabupaten = 1.052,60	54,61	Dinas PUPR
1.c.8.1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio tenaga operator/tek nisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabu/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analis = 38 Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analis di wilayah Kabupaten = 208	18,27	Dinas PUPR
1.c.8.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa terjadi kecelakaan konstruksi = 0 proyek yang	0	Dinas PUPR

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	
					Capaian (%)	Keterangan
				menjadi kewenangan pengawasannya = 172		
1.d.1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun 2024 = 1 Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun 2024 = 1	100	Dinas Perkimtan
1.d.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten	Rumah Tangga Penerima Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni = 0 Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan = 1	0 (TDI)	Dinas Perkimtan
1.d.3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha) = 5,70 Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha = 107,98	5,28	Dinas Perkimtan
1.d.4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Jumlah unit rumah tidak layak huni = 4.964 Jumlah total unit rumah kabupaten = 59.108	8,40	Dinas Perkimtan

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	
					Capaian (%)	Keterangan
1.d.5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU = 240 Jumlah unit rumah kabupaten = 59.108	0,41	Dinas Perkimtan
1.e.1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah pengaduan yang ditangani = 4 Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk = 4	100	Satpol PP dan Damkar
1.e.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan = 5 Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi = 5	100	Satpol PP Dan Damkar
1.e.3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana = 2.267 Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sesuai target yang ditetapkan = 2.267	100	BPBD
1.e.4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana = 300 Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana = 2.486	12,07	BPBD

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	
					Capaian (%)	Keterangan
1.e.5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana = 2.291 Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana = 2.291	100	BPBD
1.e.6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah ditambah jumlah layanan pemadaman di kabupaten/kota dalam tingkat = 51 Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota = 51	100	Satpol PP dan Damkar
1.e.7	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman Kebakaran = 10,12	10,12	Satpol PP dan Damkar

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	
					Capaian (%)	Keterangan
1.f.1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti = 25 Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis = 25	100	Dinas SosialP3APP KB
1.f.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran = 500 Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten = 500	100	Dinas SosialP3APP KB

C. Hasil EPPD dan Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

a. Hasil EPPD

Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa EPPD dilakukan untuk menilai kinerja keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah baik secara keseluruhan maupun keberhasilan pelaksanaan masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Selanjutnya pada Pasal 21 di jelaskan bahwa Hasil EPPD digunakan oleh Pemerintah Pusat sebagai bahan:

- a) pertimbangan pemberian penghargaan;
- b) sinkronisasi perencanaan dan penetapan target pembangunan pusat dan daerah; dan
- c) pembinaan terhadap peningkatan kemampuan pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah sehingga menghasilkan kinerja yang tinggi.

Berikut adalah hasil EPPD Kabupaten Dharmasraya:

Tabel 3.1
Peringkat, Nilai dan Prestasi Kinerja EPPD Kabupaten Dharmasraya
untuk Kabupaten Secara Nasional

No.	LPPD Tahun	Peringkat Nasional	Skor	Status	Dasar
1.	LPPD 2015 EPPD 2016	231	2.8124	Tinggi	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 120-10421 Tahun 2016
2.	LPPD 2016 EPPD 2017	120	3.1226	Sangat Tinggi	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-53 Tahun 2018
3.	LPPD 2017 EPPD 2018	37	3.1551	Sangat Tinggi	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 118-8840 tahun 2018
4.	LPPD 2018 EPPD 2019		3.5138	Sangat Tinggi	Piagam Penghargaan Menteri Dalam Negeri Tanggal 25 April 2020
5.	LPPD 2019 EPPD 2020				Tidak Diumumkan
6.	LPPD 2020 EPPD 2021				Tidak Diumumkan
7.	LPPD 2021 EPPD 2022	43	2,88	Sedang	Keputusan Menteri Dalam Negeri 100.2.1.3-1109 Tahun 2023
8.	LPPD 2022 EPPD 2023	9	3,5036	Tinggi	Keputusan Menteri Dalam Negeri 100.2.1.7-6646 Tahun 2023

9.	LPPD 2023 EPPD 2024				Belum diumumkan
10.	LPPD 2024 EPPD 2025				Masih Dalam Proses

b. Opini atas Laporan Keuangan Kabupaten Dharmasraya 10 Tahun Terakhir

Badan Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga pemeriksa yang bebas, mandiri dan professional dalam memeriksa tanggung jawab keuangan negara, telah memeriksa Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dengan memperhatikan kesesuaian Laporan Keuangan dengan standar Akutansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektifivitas system pengendalian intern dan kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan.

Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2
Opini atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Dharmasraya

No.	Tahun	Opini Laporan Keuangan	Keterangan
1.	2015	WTP	
2.	2016	WTP	
3.	2017	WTP	
4.	2018	WTP	
5.	2019	WTP	
6.	2020	WTP	
7.	2021	WTP	
8.	2022	WTP	
9.	2023	WTP	
10.	2024		Masih menunggu hasil dari BPK

D. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Tabel 4.3
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024

Uraian	Ref	Anggaran 2024 Setelah Perubahan	Realisasi Tahun 2024	%	Realisasi Tahun 2023
1	2	3	4	5	6
PENDAPATAN	V.A.1				
PENDAPATAN ASLI DAERAH	V.A.1.a				
Pendapatan Pajak Daerah	V.A.1.a.1	26.432.781.411,00	25.087.546.325,58	94,91	23.692.000.465,50
Pendapatan Retribusi Daerah	V.A.1.a.2	78.258.242.617,00	65.934.612.330,00	84,25	2.449.560.848,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	V.A.1.a.3	5.347.929.006,00	5.347.929.006,00	100,00	4.832.210.107,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	V.A.1.a.4	12.199.230.000,00	12.007.270.531,21	98,43	85.022.257.585,15

Uraian	Ref	Anggaran 2024 Setelah Perubahan	Realisasi Tahun 2024	%	Realisasi Tahun 2023
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		122.238.183.034,00	108.377.358.192,79	88,66	115.996.029.005,65
PENDAPATAN TRANSFER	V.A.1.b.				
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN	V.A.1.b.1				
Dana Bagi Hasil Pajak	V.A.1.b.1.a	11.920.351.000,00	14.676.153.000,00	123,12	15.830.852.055,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	V.A.1.b.1.b	18.103.314.000,00	22.402.073.000,00	123,75	19.414.761.014,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	V.A.1.b.1.c	519.999.606.000,00	512.944.707.932,00	98,64	489.147.246.531,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	V.A.1.b.1.d	170.139.551.644,00	166.360.138.484,00	97,78	183.418.901.715,00
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan		720.162.822.644,00	716.383.072.416,00	99,48	707.811.761.315,00
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA	V.A.1.b.2				
Dana Insentif Fiskal	V.A.1.b.2.a	20.744.862.000,00	20.745.042.000,00	100,00	8.601.217.000,00
Dana Desa	V.A.1.b.2.b	55.320.687.000,00	55.320.687.000,00	100,00	54.485.661.000,00
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya		76.065.549.000,00	76.065.729.000,00	100,00	63.086.878.000,00
TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	V.A.1.b.3				
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	V.A.1.b.3.a	84.698.208.159,00	58.241.057.201,00	68,76	48.627.484.675,00
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	V.A.1.b.3.b	-	-	-	-
Bantuan Keuangan		-	-	-	-
Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi		84.698.208.159,00	58.241.057.201,00	68,76	48.627.484.675,00
Total Pendapatan Transfer		880.926.579.803,00	850.689.858.617,00	96,57	819.526.123.990,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	V.A.1.c				
Pendapatan Hibah	V.A.1.c.1	100.000.000,00	71.350.441,00	71,35	1.991.137.370,00
Pendapatan Dana Darurat	V.A.1.c.2	-	-	-	-
Pendapatan Lainnya	V.A.1.c.3	11.764.153.215,00	11.690.998.858,00	99,38	-
Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah		11.864.153.215,00	11.762.349.299,00	99,14	1.991.137.370,00
JUMLAH PENDAPATAN		1.015.028.916.052,00	970.829.566.108,79	95,65	937.513.290.365,65
BELANJA	V.A.2				
BELANJA OPERASI	V.A.2.a				
Belanja Pegawai	V.A.2.a.1	469.211.518.709,00	454.925.701.972,94	96,96	373.990.257.238,36
Belanja Barang	V.A.2.a.2	324.625.008.037,00	304.013.952.063,19	93,65	278.076.015.874,40
Bunga		-		-	
Subsidi		-		-	
Hibah	V.A.2.a.3	34.593.015.000,00	34.253.926.757,00	99,02	28.767.442.546,00
Bantuan Sosial	V.A.2.a.4	-	-	-	-
Jumlah Belanja Operasi		828.429.541.746,00	793.193.580.793,13	95,75	680.833.715.658,76
BELANJA MODAL	V.A.2.b.				
Belanja Tanah	V.A.2.b.1	-	-	-	-
Belanja Peralatan dan Mesin	V.A.2.b.2	27.871.180.864,00	24.238.374.788,00	86,97	39.031.009.865,00
Belanja Gedung dan Bangunan	V.A.2.b.3	35.814.155.477,00	28.954.072.575,16	80,85	45.091.507.154,00
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	V.A.2.b.4	45.373.640.452,00	45.054.989.838,00	99,30	50.167.680.309,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	V.A.2.b.5	3.812.797.200,00	3.810.397.200,00	99,94	2.751.538.825,00
Belanja Aset Lainnya	V.A.2.b.6	131.674.000,00	131.000.000,00	99,49	242.499.170,00
Jumlah Belanja Modal		113.003.447.993,00	102.188.834.401,16	90,43	137.284.235.323,00

Uraian	Ref	Anggaran 2024 Setelah Perubahan	Realisasi Tahun 2024	%	Realisasi Tahun 2023
BELANJA TAK TERDUGA					
Belanja Tak Terduga	V.A.2.c	3.000.000.000,00	2.485.520.287,00	82,85	3.924.380.709,00
Jumlah Belanja Tak Terduga		3.000.000.000,00	2.485.520.287,00	82,85	3.924.380.709,00
JUMLAH BELANJA		944.432.989.739,00	897.867.935.481,29	95,07	822.042.331.690,76

TRANSFER	V.A.3				
TRANSFER/ BAGI HASIL KE DESA					
Bagi Hasil Pajak		2.651.291.150,00	1.809.666.373,00	68,26	1.107.049.776,00
Bagi Hasil Retribusi		269.402.000,00	174.703.451,00	64,85	110.265.502,00
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		113.330.772.640,00	113.330.772.640,00	100,00	108.235.636.000,00
JUMLAH TRANSFER/ BAGI HASIL KE DESA		116.251.465.790,00	115.315.142.464,00	99,19	109.452.951.278,00
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER		1.060.684.455.529,00	1.013.183.077.945,29	95,52	931.495.282.968,76
SURPLUS/(DEFISIT)	V.A.4	(45.655.539.477,00)	(42.353.511.836,50)	(92,77)	6.018.007.396,89
PEMBIAYAAN	V.A.5				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	V.A.5.a				
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	V.A.5.a	46.430.539.477,00	46.430.539.477,05	100,00	41.912.532.080,16
Pencairan Dana Cadangan		-	-	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	-	-	-
Pinjaman Dalam Negeri		-	-	-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah		-	-	-	-
Jumlah Penerimaan		46.430.539.477,00	46.430.539.477,05	100,00	41.912.532.080,16
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	V.A.5.b	-	-	-	-
Pembentukan Dana Cadangan					
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	V.A.5.b	775.000.000,00	-	-	1.500.000.000,00
Pembayaran Pokok Utang					
Pemberian Pinjaman Daerah					
Jumlah Pengeluaran		775.000.000,00	-	-	1.500.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO		45.655.539.477,00	46.430.539.477,05	100	40.412.532.080,16
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN SEBELUM KOREKSI		-	4.077.027.640,55	-	46.430.539.477,05
KOREKSI SILPA		-	-	-	-
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN SETELAH KOREKSI	V.A.6	-	4.077.027.640,55	-	46.430.539.477,05

Sumber data: Badan Keuangan Daerah Kab. Dharmasraya (Data Unaudit)

E. Inovasi Daerah

Merujuk Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 38 tahun 2017, inovasi daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. untuk mencapai tujuan dimaksud, sasaran inovasi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:

- a. peningkatan Pelayanan Publik;
- b. pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
- c. peningkatan daya saing Daerah.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11-4898 Tahun 2024 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2024, Indeks Inovasi daerah Kabupaten Dharmasraya adalah 63,12 dengan predikat Sangat Inovatif.

Berdasarkan Database Inovasi Kab. Dharmasraya memiliki Inovasi Sebagai Berikut:

Tabel 5.1
Pelaksana Inovasi Daerah

NO	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	SI-PINTAR (Sistem Informasi Peluang Investasi Tata Ruang)	
		SIKEMAD (Sistem Informasi Kepuasan Masyarakat Online DPMPSTP)	
		LARI PATAS TUNTAS (Layanan Perizinan Tanpa Batas Untuk Disabilitas)	
		LAF YU (Layanan Full Senyum)	
2	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	MANCING PALALA (Makan Ikan Cegah Stanting Pada Panen Lubuk Larangan)	
		Kampung Ikan Garing	
3	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	GAGAH PISAN (Gerakan Keluarga Sadar Memilah Sampah)	
4	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Klik Rumah Saya (Klinik Rumah Sehat Swadaya)	
5	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	STIGMA METER (Strategi Optimalisasi Kegiatan Kemetrolagian Melalui Sistem Terintegrasi Untuk Perlindungan Konsumen di Kabupaten Dharmasraya)	
		SIPANDU (Sistem Pelayanan Keuangan Terpadu)	
		STAN KOPI (Sistem Pelayanan Koperasi Secara Digital)	
6	DINAS PERHUBUNGAN	CeCe GeMMes (Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas Pada Generasi Muda Melalui Media Sosial)	
		BaBinhub (Bantuan, Pembinaan dan Informasi Perhubungan)	
		Si-Praja GeMa (Sistem Informasi Prasarana Jalan Via Google Maps)	
7	DINAS PENDIDIKAN	LEEXWIFA (Learning Experience With Father)	

		SATUKA (Sarana Pembentukan Karakter)	
		BERCANDA (Bermain Roda Baca dan Angka)	
		DP BANG BPD (Dashboard Pemantau perkembangan Pendidikan Daerah)	
		Game Cuak	
		Si Gemoy	
		Program PDKS (Program Peningkatan dan Karakter Siswa)	
		GESIT BUNTAGI (gerakan siswa terampil berkebun dan taman gizi)	
		JUMPA BERLIAN (JUMAT PAGI BERSIH LINGKUNGAN)	
		KomBel "MemPeng" Membangun Pengetahuan	
		New Class	
		GERAKAN STOP BULLYING (GASING)	
		Tuntas baca Alquran melalui tutor sebaya	
		PENGEMBANGAN MULTIMEDIA INTERAKTIF BERBASIS ANDROID	
		PEMBELAJARAN DIFERENSIASI YANG NYAMAN DAN MENYENANGKAN	
		SAKE SAKA (Satu Kelas Satu Karya)	
		PARAK LASIH (Pagi bergerak, sekolah bersih)	
		Pemanfaatan PANKREAS (Papan Kreasi Siswa) untuk meningkatkan kemampuan literasi siswa UPT SMP N 3 Koto Salak	
		K-IDOL (Kelas Inovatif Digital OffLine)	
8	DINAS PERTANIAN	SIMPUKDI (Simpanan Penebusan Pupuk Bersubsidi)	
		WANGI BUGAR (Warung Tani Ibu-ibu Nagari)	
		SITERASI KESAYAT (Sistem Registrasi Kebun Sawit Rakyat)	
		SIMPELA FOR NASI (Sistem Pengelolaan Informasi Dinas Pertanian)	
9	DINAS KESEHATAN	PATWAL MILITER (Patut Kawal Ibu Hamil Baca Buku KIA Terintegrasi)	
		SUMBAR RANCAK (Surat Untuk Mengabarkan Rencana Imunisasi Anak)	
10	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	COMENT BELA (Coaching, Mentoring dan Belajar Mandiri)	
		SeRaSi (Sistem Pembinaan Pegawai Negeri Sipil Pra Pensiun)	
11	BADAN KEUANGAN DAERAH	SPRIT (Sistem Perjalanan Dinas Terpadu)	
		BAPANTUN ASN (Bayar Pajak Tepat Waktu ASN)	
12	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	BULAN SUKACITA (Buku Berjalan Sukseskan Budaya Cinta Literasi)	
		(Informasi Terintegrasi dan Pengaduan puskesmas)	
13	RSUD SUNGAI DAREH	SAHABAT (Jasa Penghantaran Obat)	
		HELLO PASPOR (Hello Pasien Post Rawatan)	
14	UPT PUSKESMAS SIALANG	SIKUMBANG JATI (Awasi kesehatan dan tumbuh kembang remaja putri)	
		MARIMAS CEKDAH (Mari ke puskesmas cek dahak)	
		SIMANTU KIA (Sistem melayani terpadu kesehatan ibu dan anak)	
15	UPT PUSKESMAS SUNGAI RUMBAI	INTIP MAS (Informasi Terintegrasi dan Pengaduan Puskesmas)	INTIP MAS merupakan acuan untuk akses informasi terintegrasi dan pengaduan melalui scan barcode serta untuk meningkatkan mutu pelayanan puskesmas dengan masukan dan umpan balik dari

			pengguna layanan puskesmas serta sebagai pedoman bagi petugas dalam meningkatkan pelayanan di puskesmas
		SERUNI IKAN KAKAP (Sertifikat Imunisasi Dasar Lengkap)	Seruni Ikan Kakap (Seruni Ikan Kakap) merupakan Inovasi yang bertujuan untuk memotivasi orang tua dalam memberikan Imunisasi Dasar Lengkap untuk anak balitanya sehingga jika sudah mendapatkan IDL akan menerima sertifikat imunisasi dari Puskesmas
		BERAS MERAH (Bersihkan Sarang Nyamuk Sekitar Rumah	bertujuan untuk memberantas sarang nyamuk di lingkungan sekitar kita dan menekan angka kasus DBD
16	UPT PUSKESMAS SITIUNG 1	MARATO PASANG ANTENA (Manajemen Pelaporan Terpadu Obat Puskesmas dan Jaringan Melalui Rangkaian Microsoft Excel Sederhana)	
		LAGUKU KIAN PADU (Layanan USG, Bedah Buku KIA dan ANC terpadu)	
		DESERTASI (Barcode dan sertifikat Asi Eksklusif)	
17	UPT PUSKESMAS TIMPEH	BERITA SI TB (Bersama Nagari Kita Eliminasi TB)	
		GALI CINTAKU (Keluarga Peduli Catatan Imunisasi Dasar dan Lanjutan Untuk Kunjungan Ulang)	
18	UPT PUSKESMAS KOTO BESAR	GERTAK TB BUK DELA DAN BANG AMPUN (Gerakan Serentak Pasien TB Buka Jendela dan Lobang Penampung)	
19	UPT PUSKESMAS SITIUNG II	GERPAK BANG PASI (Gerakan Cepat Penimbangan dan Imunisasi)	
20	UPT PUSKESMAS SUNGAI DAREH	CETING DEKAN LAMA (Cegah Stunting dengan Perbaikan Pola Makan)	
		STUDIO IBU HAMIL (Skrinning Triple Eliminasi, Ungkap, Dekap, Intervensi Menuju Zero Ibu Hamil)	
		SIMANDA TUA MAS SD (Sistem Manajemen Data Tata Usaha Puskesmas Sungai Dareh)	
21	UPT PUSKESMAS BERINGIN SAKTI	GERTAK BUNTING (Gerakan Serentak Serbu Stunting)	
		SERULING TANGKIT (Seruan Keliling Tanggap Penyakit)	
22	UPT PUSKESMAS SITIUNG IV	CENTING MANISE (Cegah anemia dan stunting dengan makan bergizi dan suplementasi Fe)	
		PARE BORING (Pantau Faktor Resiko PTM dengan buku monitoring)	
		IKAN PATIN (Ikhar kesehatan pada calon pengantin)	
		CINTIA RINDU (Cegah Infeksi TB anak dengan skrining di Posyandu)	
		APEL MENTAH (Alarm peduli menurunkan kematian ibu hamil)	
		SEIMBANG (Sertifikat bayi dengan imunisasi booster lengkap)	
23	RSUD SUNGAI RUMBAI	PENERAPAN TELENURSING KACIO SMART (Edukasi <i>Tuberculosis Online Short Message Real Time</i>)	